

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Bentuk pertanggungjawaban tersebut yaitu dengan menyampaikan laporan keuangan. Salah satu komponen laporan keuangan yang perlu dijaga akuntabilitasnya adalah persediaan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Barang persediaan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Kabupaten Pamekasan pada sub bidang Keluarga Berencana dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu Persediaan berupa Alokon (Alat dan Obat Kontrasepsi) dan Non Alokon. Ketersediaan alokon menjadi salah satu prioritas dalam perencanaan dan anggaran program kerja tahunan DPPPAKB Kabupaten Pamekasan. Tidak hanya ketersediaan alokon, Persediaan non alokon berupa barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, ataupun barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat sangat penting juga pengadaannya. Karena tanpa adanya persediaan tersebut maka pelayanan yang akan dijalankan juga akan tidak akan berjalan dengan maksimal.

Selain itu dalam empat tahun terakhir ini pemerintah pusat maupun daerah memiliki tantangan terkait dengan beberapa perubahan dalam penyajian laporan keuangannya, baik sistem akuntansinya maupun aplikasi pendukungnya. Berdasarkan PMK No. 270/2014, pada tahun 2015 pemerintah pusat dan daerah

harus sudah menggunakan basis akrual murni dalam penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan basis akrual dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih baik lagi sesuai dengan prinsip akuntansi yaitu pengungkapan keseluruhan. Dengan demikian, persediaan juga perlu diatur perlakuan akuntansinya dalam basis akrual agar persediaan dan beban persediaan dapat disajikan secara wajar dalam laporan keuangan.

Salah satu yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah mengenai Persediaan pada bagian Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 05. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi terhadap persediaan ketika menyajikan laporan keuangan di DPPPAB Kabupaten Pamekasan, karena persediaan mempunyai peranan penting dalam segi anggaran untuk kegiatan operasional dan/atau diberikan kepada pihak ketiga sebagai layanan kepada masyarakat khususnya dalam bentuk alokon maupun non alokon, apakah dalam penerapannya sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.5 tentang persediaan. Dengan bahasan yang telah dijelaskan tersebut penulis mengambil judul sebagai tugas akhir yaitu **“Analisis Perlakuan Akuntansi Persediaan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05”**.

1.2 Landasan Teori

1.2.1 Definisi Persediaan

Dalam peraturan pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010, persediaan didefinisikan sebagai aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan pendapat Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (SAK IAI) pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.14 paragraf 6 efektif per 1 Januari 2017 tentang persediaan, adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi, dan/atau dalam perjalanan atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Beberapa ahli juga menyatakan pendapatnya mengenai persediaan bahwa definisi dari persediaan adalah barang-barang yang disimpan untuk digunakan atau dijual pada masa yang akan datang (Ristono,2009). Sedangkan menurut Kieso, Weygandt, and Warfield (2011: 408) definisi persediaan adalah barang aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam kegiatan bisnis biasa, atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam produksi barang yang akan dijual.

Sehingga penulis dapat menyimpulkan dari beberapa opini diatas bahwa pengertian dari persediaan adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan atau instansi yang nantinya memiliki manfaat untuk kegiatan operasional dan juga dipakai dalam kegiatan produksi dimana nantinya barang produksi tersebut akan dijual dimasa yang akan datang.

1.2.2 Klasifikasi Persediaan

Penggolongan Persediaan menurut PSAP No. 05, Persediaan merupakan aset berupa :

1. Barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, seperti: barang habis pakai seperti suku cadang,

barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, seperti: bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku konstruksi bangunan yang akan diserahkan ke masyarakat/pemda.
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, contoh: konstruksi dalam pengerjaan yang akan diserahkan kepada masyarakat, alat-alat pertanian setengah jadi/barang hasil proses produksi yang belum selesai yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemda.
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, seperti: hewan, tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pemda; serta tanah/bangunan/peralatan dan mesin/aset tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda.

Barang persediaan di DPPPAB Kabupaten Pamekasan dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu Persediaan berupa Alokon (Alat dan Obat Kontrasepsi) dan Non Alokon. Persediaan berupa alokon digolongkan pada barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Barang non alokon dapat digolongkan berupa barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintahan.

1.2.3 Definsi Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan (termasuk akuntansi untuk lembaga non profit pada umumnya) merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba. Walaupun lembaga pemerintah senantiasa berukuran besar, namun sebagaimana dalam perusahaan ia tergolong sebagai lembaga mikro (Baswir, 2000). Sedangankan Dedi Nordiawan (2006:35) mendefinisikan akuntansi pemerintah atau sektor publik adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan

pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Sehingga penulis dapat menyimpulkan dari kedua pendapat ahli tersebut bahwa akuntansi pemerintah adalah kegiatan pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan pada organisasi nirlaba (tidak mengambil keuntungan) untuk menyediakan informasi guna mengambil keputusan.

1.2.4 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Menurut Drs. Nurlan Darise, Ak., M.Si. (2008:55), Prinsip Akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan

Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah :

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah Basis Kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Basis AkruaI untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan.

Basis AkruaI untuk Neraca berarti aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2. Prinsip Nilai Historis (*Historical Cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang diayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Nilai Historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3. Prinsip Realisasi (*Realization*)

Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial.

4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang harusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

5. Prinsip Periodisitas (*Periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

6. Prinsip Konsistensi (*Consistency*)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

7. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan Atas Laporan Keuangan.

8. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusunan laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

1.2.5 Kebijakan Akuntansi Pemerintahan

1. Pengakuan

Menurut PSAP No. 05 dan peraturan Pemerintah Keuangan Republik Indonesia nomor 219/PMK.05/2013 lampiran VI, persediaan diakui pada saat :

- a. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan didalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral dan/atau
- b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Penyajian persediaan pada neraca berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi. Inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang ada di unit pengguna.

Apabila hasil inventarisasi pada DPPPAKB Kabupaten Pamekasan menunjukkan nilai seluruh persediaan Alokon pada 31 Desember 20xx sebesar Rp 100.000.000,- maka jurnal yang dibuat :

Tabel 1.1 Pencatatan Jurnal Persediaan

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
31 Des 200xx	Persediaan Alokon	100.000.000	
	Cadangan Persediaan		100.000.000

Beban persediaan diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan perhitungan dari transaksi penggunaan persediaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat atau sebab lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah persediaan.

2. Pengukuran

Menurut PSAP No. 05 dan peraturan Pemerintah Keuangan Republik Indonesia nomor 219/PMK.05/2013 lampiran VI, persediaan disajikan sebesar :

a. Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

3. Pengungkapan

Menurut PSAP No. 05, persediaan disajikan di neraca pada bagian asset lancar. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan :

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan
- b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
- c. Jenis, jumlah dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang

1.3 Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Tujuan yang ingin dicapai dalam pengerjaan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu mata kuliah prasyarat kelulusan dari program Diploma Akuntansi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya.
2. Mengetahui penerapan akuntansi PSAP Nomor 05 tentang persediaan mulai dari proses pengakuan persediaan hingga terjadinya pengungkapan persediaan di laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan.
3. Untuk mengetahui kegiatan di lapangan dan memperluas pengetahuan serta wawasan dalam bidang akuntansi.

1.4 Manfaat Penulisan Tugas Akhir

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya :

1. Bagi Penulis :
 - a. Dapat memenuhi salah satu mata kuliah prasyarat kelulusan dari program Diploma Akuntansi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya.
 - b. Sebagai penerapan ilmu akuntansi yang telah diperoleh selama kuliah khususnya bidang Akuntansi Sektor Publik dalam hal PSAP Nomor 05 mengenai Persediaan.
 - c. Melatih proses berpikir kritis dan bertindak dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir.
2. Bagi Almamater
 - a. Menjadi sarana mengenalkan kualitas mahasiswa Universitas Airlangga kepada Instansi atau masyarakat sekitar.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan bagi mahasiswa yang sedang melakukan penulisan tugas akhir.
3. Bagi Dinas PPPA dan KB Kabupaten Pamekasan
 - a. Sebagai media untuk meningkatkan kerja sama antara Dinas PPPA dan KB Kabupaten Pamekasan dengan Universitas Airlangga, baik dalam penyediaan tempat pengambilan data ataupun kerjasama dalam bentuk lainnya.
 - b. Memberikan tambahan informasi mengenai PSAP Nomor 05 tentang persediaan.
4. Bagi Pembaca
 - a. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai Dinas PPPA dan KB Kabupaten Pamekasan.

- b. Sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat menjadi acuan untuk melaksanakan kegiatan sejenis di masa yang akan datang.

1.5 Rencana Kegiatan

Tabel 1.2 Rencana Kegiatan PKL dan TA

No	Kegiatan	November 2019				Desember 2019				Januari 2020				Februari 2020				Maret 2020				April 2020				Mei 2020				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Ijin Lokasi PKL	■																												
2	Pembekalan PKL		■	■	■																									
3	Pelaksanaan PKL					■	■	■	■	■	■	■	■																	
4	Penentuan Dosbing												■																	
5	Pengajuan Tema TA												■	■																
6	Penyusunan Laporan TA														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
7	Revisi Dosbing																		■	■	■	■	■	■	■	■				
8	Pengumpulan Laporan TA																												■	

1.6 Metode Laporan Kasus

Adapun metode laporan kasus yang digunakan dalam tugas akhir ini yaitu :

a. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam tugas akhir ini yaitu analisis deskriptif dengan membandingkan perlakuan akuntansi persediaan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan dengan aturan yang tercantum pada PP 71 Tahun 2010 mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor. 05 tentang Akuntansi Persediaan.

b. Lokasi dan Waktu

Pengambilan data dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan yang beralamatkan di Jalan Pintu Gerbang No.38, Sumur Putih, Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Pengambilan data dilaksanakan pada bulan Mei 2020.

c. Objek Laporan Kasus

Objek laporan tugas akhir ini adalah pengelolaan dan perlakuan terhadap Persediaan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan sesuai dengan PSAP No. 05 dari Pengakuan hingga terjadi Pengungkapan pada Laporan Keuangan.

d. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan tugas akhir ini, yakni sebagai berikut :

1. Wawancara

Komunikasi atau pembicaraan dua arah yang dilakukan oleh penulis dan responden yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan persediaan untuk menggali informasi yang relevan dengan tujuan tugas akhir.

2. Observasi

Pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh penulis di DPPAKB Kabupaten Pamekasan untuk mendapatkan data dan bahan terkait pengelolaan persediaan di lokasi tersebut.

3. Dokumen

Proses pembuktian berdasarkan sumber penelitian berupa tulisan, lisan, gambaran ataupun karya-karya yang dapat memberikan informasi selama proses penelitian tugas akhir.

e. Teknik Analisis Data**1. Pemahaman unit analisis****2. Memahami latar belakang, menentukan tujuan dan manfaat****3. Mengumpulkan data****4. Membandingkan antara teori perlakuan akuntansi persediaan dengan penerapannya****5. Membuat kesimpulan dan saran**

Gambar 1.1 Teknis Analisis Data